

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Daerah

Menurut Lincoln (1999), pembangunan Daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada secara bijak dan membentuk suatu pola kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi. Melalui kemitraan daerah dan partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu mengolah potensi – potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun daerahnya.

Terdapat perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya membuat corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula, kebijakan yang diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu berhasil dan memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Jika akan melakukan pembangunan pada suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. (Arsyad, L,1999).

Menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsisten pemerintahan negara dimaksud meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom.

Menurut UU No. 22 tahun 1999 tersebut, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan atas tiga asas yaitu :

a. Asas Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang diserahkan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Hal ini menyangkut dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut lembaga perencanaan.

b. Asas Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah. Dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan yang diserahkan pemerintah kepada pejabatnya di daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah

pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengawasan.

c. Tugas Pembantu

Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta pemerintah daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah daerah, melainkan masih terdapat beberapa urusan yang masih menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah pusat.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Saleh (2003), pendapatan daerah merupakan sesuatu yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten /kota dalam upaya melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Penerimaan daerah inilah yang digunakan pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di daerah, sehingga dengan semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah maka pembangunan perekonomian suatu daerah akan meningkat dan berjalan lancar. Dalam rangka memenuhi

prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka oleh daerah diberikan sumber – sumber keuangan untuk membiayai berbagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai daerah otonom. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah. Berikut ini adalah klasifikasi Pendapatan Asli Daerah :

d. Pajak Daerah

Menurut Yani (2008), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau swasta kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan itu diharapkan pemerintah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan maksimal. Beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2002, daerah kabupaten/kota diberi wewenang untuk menggali potensi sumber keuangannya dengan menetapkan pajak selain pajak yang sudah ditetapkan.

e. Retribusi Daerah

Menurut Yani (2008) retribusi daerah adalah sebuah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atas pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah seperti halnya pajak daerah yang menjadi salah pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi dari sumber keuangan daerah dengan menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan yang masyarakat inginkan.

Menurut Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayara jasa atas izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau kelompok.

Retribusi untuk kabupaten/kota dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing – masing daerah.
- 2) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing – masing daerah,

terdiri dari 13 jenis retribusi jasa usaha (Kadjatmiko,2007 : 78)

Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah : retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, retribusi jasa usaha tempat penginapan.

f. Lain – lain PAD yang Sah

Menurut Halim, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain – lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi sebagai berikut :

- 1) hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan,
- 2) penerimaan bunga deposito,
- 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 4) penerimaan jasa giro,
- 5) penerimaan ganti rugi atas kehilangan kekayaan daerah.

3. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil yaitu akan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Dengan itu Pemda menyediakan social overhead capital

yang memadai. Social overhead capital sendiri dapat menentukan sebuah keberhasilan negara dalam melakukan pembangunan nasional, penentasan kemiskinan dan juga perluasan perdagangan.

4. Potensi Keuangan Daerah

Potensi keuangan daerah adalah sebuah kemampuan suatu daerah menghasilkan penerimaan untuk daerahnya sendiri. Terdapat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keuangan daerah, terdiri dari :

a. Kondisi Awal Suatu Daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial daerah yang menentukan besar kecilnya pemerintah untuk menetapkan pungutan, karena hal ini yang menyebabkan tinggi rendahnya tuntutan ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang di tetapkan pemerintah daerahnya.

Kondisi awal ini mencakup beberapa hal, yaitu :

- 1) Komposisi industri yang ada di daerah
- 2) Struktur sosial, politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan
- 3) Tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan

b. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intesifikasi Penerimaan

Dalam meningkatkan cakupan ini terdapat hal yang diperhatikan :

- 1) Menambah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi.
- 2) Meningkatkan besarnya penetapan
- 3) Mengurangi besarnya tunggakan

c. Perkembangan PDRB Perkapita Riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan juga mempengaruhi besarnya pungutan yang dibayarkan. Maka semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah juga semakin besar pula potensi sumber pendapatan daerah tersebut.

d. Pertumbuhan Penduduk

Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. Akan tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah. PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Untuk menghitung nilai PDRB terdapat tiga macam pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi di suatu wilayah tertentu.
- b. Pendekatan pengeluaran adalah dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua sektor ekonomi yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu (Guritno Mangkoesubroto,1998)

Untuk mendapatkan total dari PDRB maka nilai dari masing – masing sektor di jumlahkan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang menimbulkan intensif untuk diubahnya struktur produksi (saat pendapatan meningkat maka permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dibandingkan barang – barang pertanian) (Todaro,2000).

Dalam perhitungan PDRB, menurut lapangan usaha dibagi menjadi 9 sektor yaitu :

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Bangunan
- 5) Perdagangan, hotel, dan restoran
- 6) Listrik dan gas

- 7) Angkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan dan perusahaan
- 9) Jasa – jasa

Jika dikaitkan dengan sektor wisata, maka pendapatan perkapita yang diindikasikan dengan PDRB memiliki pengaruh yang cukup positif. Hal ini dikarenakan jika masyarakat melakukan kegiatan wisata, pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tingkat sosialnya cukup tinggi. Artinya kebutuhan hidup pokok mereka sudah terpenuhi dan mempunyai cukup uang untuk membiayai kegiatan wisata mereka. Maka dari itu jika pendapatan perkapita masyarakat yang dipengaruhi oleh PDRB meningkat akan mengakibatkan kegiatan wisata mereka juga meningkat dan akan berpengaruh positif bagi meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

6. Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah

Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan suatu daerah yang digunakan pemerintah untuk membiayai dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan daerah kepada masyarakat agar produktivitasnya meningkat.

PDRB merupakan faktor dari Pendapatan Asli Daerah, dengan meningkatnya PDRB maka bertambah pula penerimaan dari pajak

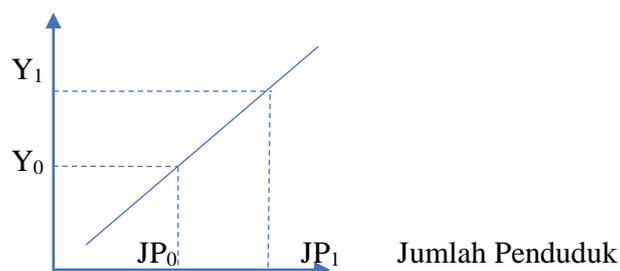
daerah. Dengan demikian akan adanya pertambahan penerimaan dari yang berasal dari masyarakat yang nantinya akan juga kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

7. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Adam Smith, penambahan jumlah penduduk yang tinggi yang diiringi dengan kemajuan teknologi akan mendorong penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan hal yang dibutuhkan karena merupakan unsur yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.1

Kurva Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan
Pendapatan



Sumber : Sadono Sukirno (2004)

Gambar diatas menunjukkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk maka juga akan semakin tinggi pula pendapatan yang diterima. Maka dari itu diikuti oleh peningkatan

produksi yang akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian baru di sektor produksi. Jumlah penduduk dari JP_0 menjadi JP_1 , menyebabkan pendapatan naik dari Y_0 menjadi Y_1 karena $Y = C$ (Adi Haryanto, 2014)

8. Hubungan Kemiskinan dengan Pendapatan Asli Daerah

Kemiskinan adalah hal yang tidak dapat dipungkiri dalam sebuah negara. Jika kemiskinan pada suatu daerah tinggi maka akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan jika pendapatan perkapita masyarakat sedikit bahkan hampir tidak ada nantinya masyarakat tidak akan bisa membayar pajak dan pungutan – pungutan. Akan tetapi tingkat kemiskinan akan menurun jika terjadinya inflasi cukup besar.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

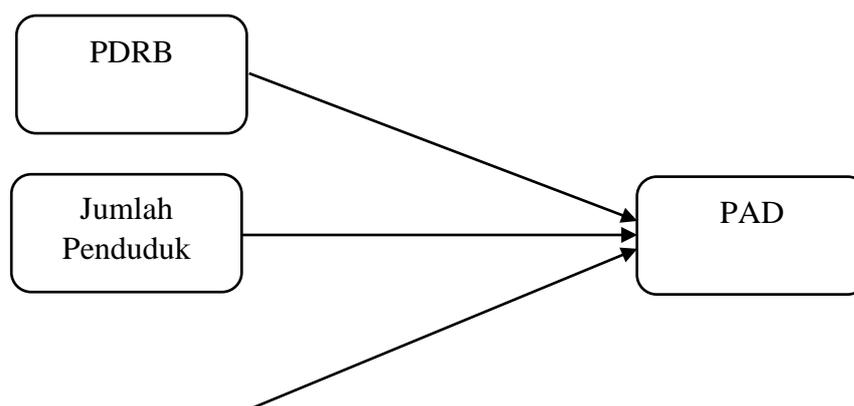
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

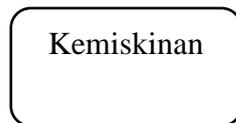
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hening Fitria Sarasati El Rani, 2015	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Karesidenan Pekalongan)	PAD, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk	Bahwa Pengeluaran pemerintah dan PDRB signifikan terhadap PAD. Sedangkan Jumlah Penduduk tidak signifikan
2.	Sri Dewi Sari, 2014	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di	PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Jumlah Pengunjung	Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pengunjung

		Kabupaten Klaten tahun 1989-2011	Pariwisata	Pariwisata bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Klaten
3.	Arief Eka Atmaja, 2011	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang	PAD, Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB	Bahwa variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
4.	Tri Cahyono, 2004	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 1990-2002	Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB, Investasi, Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita	Secara bersama-sama variabel PDRB, Investasi, Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap besarnya PAD Kabupaten Karanganyar

C. Model Penelitian

Kerangka pikir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :





Gambar 2.2

Skema Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Variabel yang Mempengaruhinya

D. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Diduga variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.